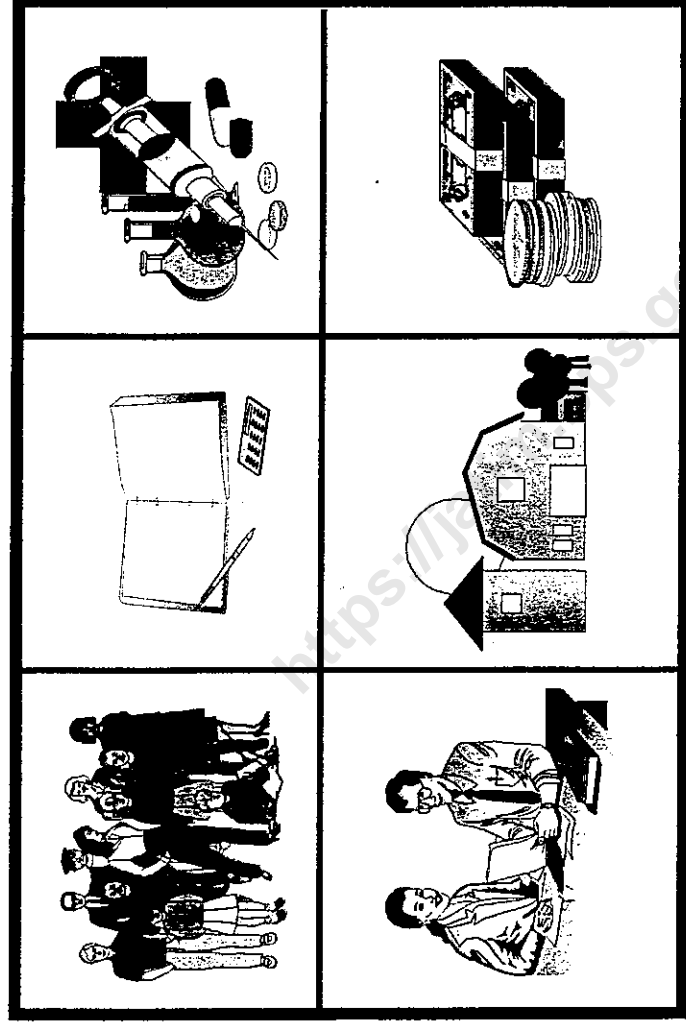


Katalog BPS : 4101.3500

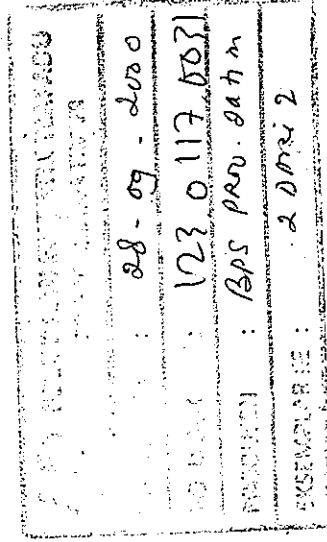
*Laporan Eksekutif* 298

# Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 1999 Propinsi Jawa Timur



*BPS*

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROPINSI JAWA TIMUR**



## *Laporan Eksekutif*

# Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 1999 Propinsi Jawa Timur

Nomor publikasi : 35523.0002  
Katalog BPS : 4101.3500

Naskah :  
Bidang Kependudukan  
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur

Gambar Kulit :  
Bidang Kependudukan  
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur

Dicetak Oleh :  
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur

Diterbitkan oleh :  
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

## KATA PENGANTAR

Laporan Eksekutif hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 1999 Propinsi Jawa Timur, dimaksudkan untuk memberikan laporan awal berbagai indikator kesejahteraan rakyat yang telah dihimpun melalui Susenas 1999, antara lain menyangkut aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran perkapita.

Laporan Eksekutif ini hanya menyajikan hal-hal pokok, dengan harapan dapat memberikan informasi penting secara cepat dan mudah bagi pengguna data, khususnya para eksekutif yang waktunya sangat terbatas untuk mengkaji data yang bersifat rinci.

Bagi para perencana pembangunan, akademisi, peneliti, LSM dan pemerhati masalah demografi-sosial lainnya yang memerlukan data rinci, hasil Susenas 1999 juga diterbitkan dalam seri lain yang berjudul "**Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 1999 Jawa Timur**". Publikasi dimaksud memuat secara lengkap data demografi dan sosial ekonomi penduduk Propinsi Jawa Timur hasil Susenas 1999, dirinci menurut Kabupaten/Kotamadya dan jenis kelamin.

Semoga penulisan ini bermanfaat. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan berikutnya.

Surabaya, Maret 2000  
KEPALA BPS PROPINSI JAWA TIMUR,



MUKADI HADIWIDJOJO, M.Sc.  
NIP. 340 003 227

## DAFTAR ISI

*Halaman*

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

### **1** PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Metodologi Survei .....	1
1.3 Tujuan Penulisan .....	2

### **2** KEPENDUDUKAN

2.1 Pertumbuhan dan Sex Ratio .....	3
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk .....	4
2.3 Struktur Umur .....	5
2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana .....	7

### **3** KESEHATAN

3.1 Keluhan Utama Kesehatan dan Upaya Pengobatan .....	11
3.2 Kesehatan Balita.....	12
a. Penolong Kelahiran .....	13
b. Pemberian ASI .....	14
c. Imunisasi .....	15
3.3 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) .....	16

### **4** PENDIDIKAN

4.1 Angka Melek Huruf (AMH) .....	18
4.2 Partisipasi Sekolah .....	19
4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....	21

### **5** KETENAGAKERJAAN

5.1 Angkatan Kerja .....	23
5.2 Lapangan Pekerjaan .....	24
5.3 Jenis Pekerjaan .....	25
5.4 Status Pekerjaan Utama .....	26
5.5 Jam Kerja .....	28

### **6** PERUMAHAN

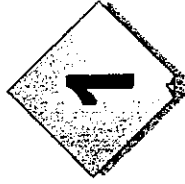
6.1 Kualitas Bangunan Tempat Tinggal .....	29
6.2 Fasilitas Tempat Tinggal.....	30

### **7** PENGELUARAN PER KAPITA

7.1 Distribusi Pengeluaran.....	32
7.2 Pola Pengeluaran .....	33

### **8** PENUTUP .....

36



# PENDAHULUAN

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei rumah tangga yang dirancang untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan akan data kesejahteraan rakyat.

Variabel data yang dicakup antara lain meliputi aspek demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran rumah tangga. Laporan eksekutif ini hanya berisikan hal-hal pokok berkaitan dengan beberapa aspek dimaksud.

## 1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hankam, adalah tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mengingat kesejahteraan merupakan hasil akhir dari akumulasi berbagai kegiatan pembangunan yang lain, maka untuk mengetahui, memantau dan mengevaluasi perkembangannya diperlukan adanya seperangkat indikator yang mampu memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan rakyat dimaksud.

Berbagai indikator yang bisa diterapkan untuk keperluan tersebut, antara lain terhimpun dalam Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Susenas adalah suatu survei di bidang sosial ekonomi yang sangat lengkap, dilaksanakan secara rutin/setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengingat Susenas dilaksanakan secara berkesinambungan, maka data yang dihasilkan akan sangat membantu bagi para perencana pembangunan, peneliti, akademisi, pemerhati masalah sosial, LSM dan juga swasta dalam melaksanakan penelitian, evaluasi dan perencanaan di bidang sosial ekonomi secara tahunan, terutama untuk berbagai permasalahan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

## 1.2 Metodologi Survei

Susenas 1999 merupakan survei di bidang sosial ekonomi yang dilakukan melalui pendekatan rumah tangga dan dilaksanakan di seluruh propinsi di Indonesia. Jumlah sampel di seluruh Indonesia sebanyak 208.672 rumah tangga, sedangkan untuk Propinsi Jawa Timur mencakup 29.024 rumah tangga, tersebar di seluruh kabupaten/kotamadya dan meliputi hampir seluruh kecamatan yang ada. Jumlah sampel untuk masing-masing

kabupaten/kotamadya berkisar antara 608 hingga 1.216 rumah tangga. Dengan sejumlah sampel tersebut, maka data hasil Susenas bisa diestimasi sampai dengan daerah tingkat II.

Metode pengumpulan data dari rumah tangga terpilih, dilakukan melalui wawancara langsung antara petugas survei dengan responden. Sebelum melakukan tugasnya, petugas survei dilatih untuk memahami berbagai konsep dan definisi serta tata cara pelaksanaan pengumpulan data. Hal ini diperlukan agar petugas dalam melaksanakan tugasnya, sudah memahami konsep baku yang digunakan sehingga bisa dihindari adanya kesimpangsiuran pemahaman atau persepsi, baik antara petugas dengan responden maupun antar petugas itu sendiri.

### **1.3 Tujuan penulisan**

Penyusunan laporan eksekutif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas tentang kondisi sosial ekonomi penduduk Propinsi Jawa Timur pada tahun 1999 berdasarkan data hasil Susenas 1999.

Pembahasan mengenai pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kependudukan. Hal ini dilakukan mengingat penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri yang dapat memberi dampak terhadap tercapainya pembangunan. Guna mendukung tercapainya pembangunan tersebut maka diperlukan data kependudukan yang akurat dan berkesinambungan, seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan masalah kependudukan.

## 2.1 Pertumbuhan Penduduk dan Sex Ratio

Penanggulangan masalah kependudukan merupakan salah satu faktor terpenting dalam usaha pembangunan nasional. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang dapat merugikan pembangunan itu sendiri.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin,  
Tahun 1990 dan 1999

Karakteristik	1990	1999
Laki-laki	15 909 293	17 181 981
Perempuan	16 578 451	17 717 255
Jumlah	32 487 744	34 899 236
Sex Ratio	95,96	96,98

Sumber : SP 1990 dan Susenas 1999

Selama tahun 1990-1999 usaha menurunkan angka rata-rata pertumbuhan penduduk telah dilaksanakan oleh pemerintah dan tampaknya telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selama periode tersebut, pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 0,80 persen pertahun. Padahal sebelumnya, angka rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 1980-1990 mencapai 1,08 persen pertahun. Melihat kondisi yang demikian, nampaknya upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk di

Jawa Timur sehingga keadaan penduduk menjadi tanpa pertumbuhan (*Zero Population Growth*) akan dapat tercapai paling lambat pada pertengahan dekade kedua abad ke-21.

Dari segi jumlah penduduk, sejak sekitar tahun 1990 Jawa Timur merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Tahun 1999 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 34,899 juta jiwa. Angka tersebut akan menjadi dua kali lipat jumlahnya pada tahun 2086, apabila pertumbuhan penduduk sebesar 0,80 persen tetap berlangsung.

Dari Tabel 2.1 dapat pula diperlihatkan angka sex ratio yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara rata-rata, pada tahun 1990 terdapat 95,96 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 1999, yaitu menjadi sekitar 96,98 orang laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

*Penduduk Jawa Timur pada tahun 1999 sebesar 34,899 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduk stabil sebesar 0,80 persen per tahun, diperkirakan akan menjadi dua kali lipatnya pada tahun 2086*

## 2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya angka kepadatan penduduk. Pada tahun 1990 tingkat kepadatan penduduk di Jawa Timur mencapai 679 jiwa per kilometer persegi, kemudian pada tahun 1998 naik menjadi 721 jiwa per kilometer persegi dan tahun 1999 menjadi 752 jiwa per kilometer persegi.

Propinsi Jawa Timur disamping memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi, ternyata persebarannya belum merata. Sebagian besar penduduk tampaknya masih terkonsentrasi pada daerah perkotaan atau daerah kotamadya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan menyediakan fasilitas diberbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Dari 8 kotamadya di Jawa Timur, Surabaya merupakan daerah terpadat penduduknya. Akan tetapi jika kita amati pertumbuhan tingkat kepadatannya, tidak menutup kemungkinan bahwa Kotamadya Malang akan menjadi salah satu daerah terpadat di



Jawa Timur, mengingat tingkat pertumbuhan kepadatannya relatif besar yaitu sekitar 1,76 persen per tahun.

**Tabel 2.2.**  
**Kepadatan Tertinggi di Beberapa Dati II, Propinsi Jawa Timur,**  
**Tahun 1990 dan 1999**

Kotamadya	Kepadatan Penduduk (jwa per km persegi)		Pertumbuhan (r %)
	1990	1999	
Surabaya	7 578	8 771	1,64
Malang	6 316	7 388	1,76
Mojokerto	6 058	6 788	1,27
Madiun	5 117	5 187	0,15
Pasuruan	4 309	4 812	1,23
Kediri	3 936	4 230	0,80
Blitar	3 652	3 835	0,55
Probolinggo	3 122	3 509	1,31

Sumber : SP 1990 dan Susenas 1999

Dampak sosial yang umumnya terjadi di daerah dengan tingkat kepadatan tinggi antara lain berkembangnya pemukiman kumuh dan meningkatnya angka pengangguran serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

*Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Propinsi Jawa Timur masih terkonsentrasi pada daerah kotamadya, yaitu antara 3 000 – 9 000 jiwa per km persegi*

### 2.3 Struktur Umur

Komposisi umur penduduk penting untuk diketahui, terutama dalam kaitannya dengan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi. Jika tingkat kelahiran semakin tinggi umumnya akan menyebabkan proporsi penduduk muda semakin besar dan struktur umur penduduk akan mengarah ke penduduk muda. Hal lain yang juga terjadi apabila tingkat kematian pada umur muda khususnya kematian bayi semakin tinggi akan mendorong tingkat kelahiran semakin tinggi yang pada gilirannya

akan memperbesar proporsi penduduk muda. Selanjutnya jika tingkat migrasi semakin tinggi maka proporsi penduduk usia produktif semakin berkurang karena perpindahan penduduk umumnya dilakukan oleh penduduk usia tersebut.

Tabel 2.3.  
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,  
Propinsi Jawa Timur, Tahun 1998 – 1999

Tahun	0 - 14	15 - 64	65 +	Jumlah
<b>1998</b>				
L	28,86	65,60	5,53	100,00
P	26,31	66,90	6,78	100,00
L+P	27,55	66,27	6,17	100,00
<b>1999</b>				
L	27,97	66,44	5,59	100,00
P	25,03	68,16	6,81	100,00
L+P	26,48	67,31	6,21	100,00

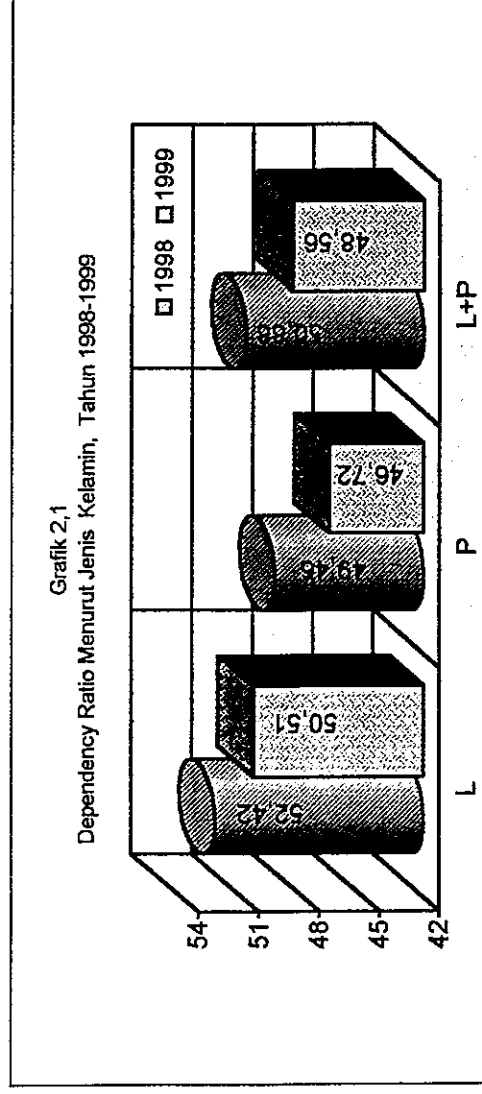
Sumber : Susenas 1998 - 1999

Gambaran mengenai komposisi umur penduduk Jawa Timur berdasarkan hasil Susenas 1999 disajikan pada Tabel 2.3. Terlihat bahwa persentase penduduk usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 26,48 persen. Dari angka tersebut terdapat 8,12 persen penduduk balita (0 – 4) tahun. Dibandingkan dengan tahun 1998 angka tersebut turun sekitar 0,36 persen poin.

Pada kelompok lanjut usia (lansia) yaitu penduduk berusia (65 tahun atau lebih) menunjukkan kenaikan. Tahun 1999 persentase penduduk lansia sebesar 6,21 persen, mengalami kenaikan sekitar 0,03 persen poin dibandingkan tahun 1998. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penduduk Jawa Timur bisa dikategorikan sebagai penduduk pada usia "intermediate" dengan umur median sebesar 23,13 tahun.

Bertambahnya penduduk lansia dan rendahnya angka fertilitas pada dasarnya mencerminkan adanya peningkatan angka harapan hidup. Tahun 1999 angka harapan hidup di Jawa Timur diperkirakan mencapai 65,5 tahun.

Hal lain yang bisa diperhatikan dari struktur umur penduduk adalah gambaran tentang angka beban penduduk secara ekonomi atau *Dependency Ratio* (DR). Hasil Susenas menunjukkan bahwa angka DR tahun 1998 sebesar 50,88 turun menjadi 48,56 pada



tahun 1999. Angka sebesar 48,56 tersebut dapat ditafsirkan bahwa dari 100 penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung beban sebanyak 49 orang penduduk usia tidak produktif, (usia 0 – 14 dan 65 tahun atau lebih).

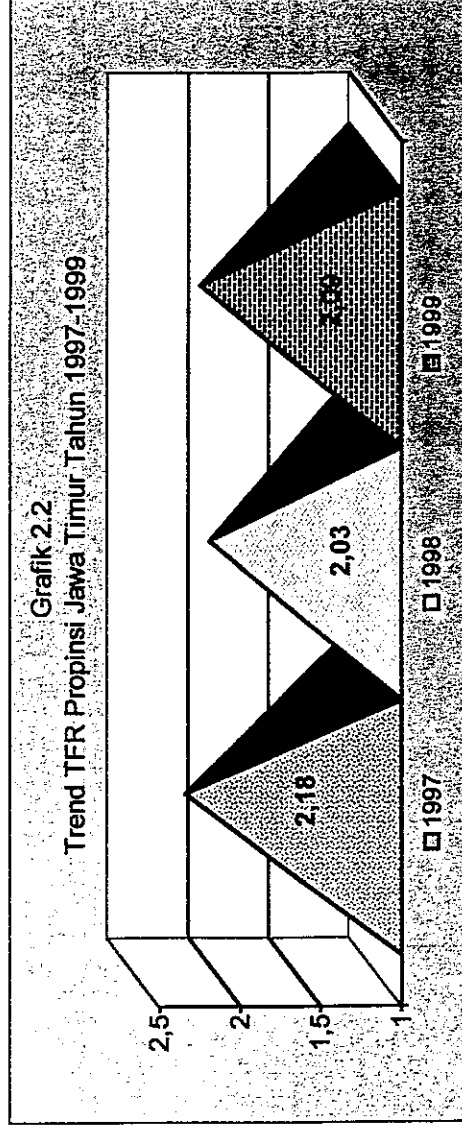
*Penduduk Jawa Timur bisa dikategorikan sebagai penduduk pada usia "intermediate" dengan umur median sebesar 23,13 tahun*

## 2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu komponen perubahan penduduk, disamping mortalitas atau kematian dan migrasi. Jika fertilitas merupakan faktor penambah jumlah penduduk suatu wilayah dalam suatu periode, maka mortalitas merupakan faktor pengurang jumlah penduduk. Penambahan jumlah penduduk melalui fertilitas terbatas pada kelompok-kelompok usia muda. Sebaliknya, mortalitas dan migrasi dapat mempengaruhi jumlah penduduk untuk semua kelompok umur. Walaupun demikian, fertilitas pada umumnya lebih berpengaruh daripada mortalitas ataupun migrasi terhadap jumlah dan struktur umur suatu penduduk.

Salah satu ukuran fertilitas yang digunakan dalam bahasan ini adalah angka fertilitas total (*Total Fertility Rate/TFR*), yaitu rata-rata jumlah anak yang secara hipotesis dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya.

Salah satu ukuran fertilitas yang akan digunakan dalam bahasan ini adalah angka fertilitas total (TFR), yaitu rata-rata jumlah anak yang secara hipotesis dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya.



Data Susenas menunjukkan bahwa angka TFR pada tahun 1999 sebesar 2,09, artinya secara hipotesis dari 10 orang ibu akan melahirkan sekitar 21 anak sampai akhir masa reproduksinya. Dibandingkan TFR tahun 1998 terjadi sedikit kenaikan, tetapi apabila dibandingkan dengan TFR tahun 1997 sudah terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam menurunkan kelahiran selama tahun 1998 – 1999 belum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Meskipun demikian angka yang telah dicapai tersebut sudah cukup rendah, karena disadari memang tidak mudah untuk menurunkan angka TFR yang sudah rendah.

*TFR tahun 1997 sebesar 2,18 selanjutnya menurun menjadi 2,03 pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 sedikit meningkat menjadi 2,09. Disadari memang tidak mudah menurunkan angka TFR apabila sudah mencapai sekitar angka 2.*

Hasil Susenas 1999 menunjukkan bahwa persentase wanita yang menikah pada kelompok usia muda (dibawah 18 tahun) masih tinggi yaitu sekitar 64,56 persen. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi besarnya jumlah anak yang akan dilahirkan. Namun tidak selalu demikian halnya yang terjadi di Jawa Timur. Hal ini tercermin dari angka TFR yang dicapai sudah cukup rendah. Rendahnya angka tersebut mencerminkan motivasi penduduk yang cukup tinggi dalam melakukan pembatasan dan penjarangan kelahiran.

Tabel 2.4  
 Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama,  
 Jawa Timur, 1998 – 1999

Umur Perkawinan Pertama	1998	1999
≤ 16	39,36	37,45
17 – 18	26,34	27,11
19 – 24	29,10	30,36
25 +	5,20	5,08
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 (11.016)	100,00 (10.975)

Sumber : Susenas 1998 - 1999

Salah satu kebijaksanaan utama yang dilaksanakan pemerintah di bidang kependudukan yang berkaitan langsung dengan penurunan tingkat kelahiran adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB antara lain mencakup penggunaan kontrasepsi dari PUS (Pasangan Usia Subur, yaitu penduduk wanita berstatus kawin yang berusia 15 – 49 tahun) yang menggunakan alat/cara KB dan jenis alat/cara yang digunakan.

Tabel 2.5  
 Persentase PUS Menurut Jenis Alat/Cara KB Yang Sedang Digunakan Di Jawa  
 Timur Tahun 1998 – 1999

Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan	1998	1999
IUD	18,38	17,24
Suntikan	36,12	36,97
Pil	27,17	27,86
Lainnya	18,33	17,93
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 (3.938)	100,00 (3.922)

Sumber : Susenas 1998 - 1999

Jumlah PUS berdasarkan hasil Susenas 1999 sebanyak 6.842.499 orang atau 70,76 persen dari seluruh wanita usia subur (seluruh wanita berusia 15 – 49 tahun). Dari sejumlah itu, sekitar 57,31 persen diantaranya menyatakan pernah/sedang menggunakan alat/cara KB.

Selama tahun 1998–1999, pemakaian alat/cara KB tidak banyak mengalami perubahan. Selama periode tersebut, alat/cara KB yang banyak digunakan adalah suntikan, pil dan IUD. Pada tahun 1999, pemakaian alat/cara KB berupa suntikan dan pil mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,85 persen poin dan 0,69 persen poin, sedangkan IUD mengalami penurunan sebesar 1,14 persen poin.

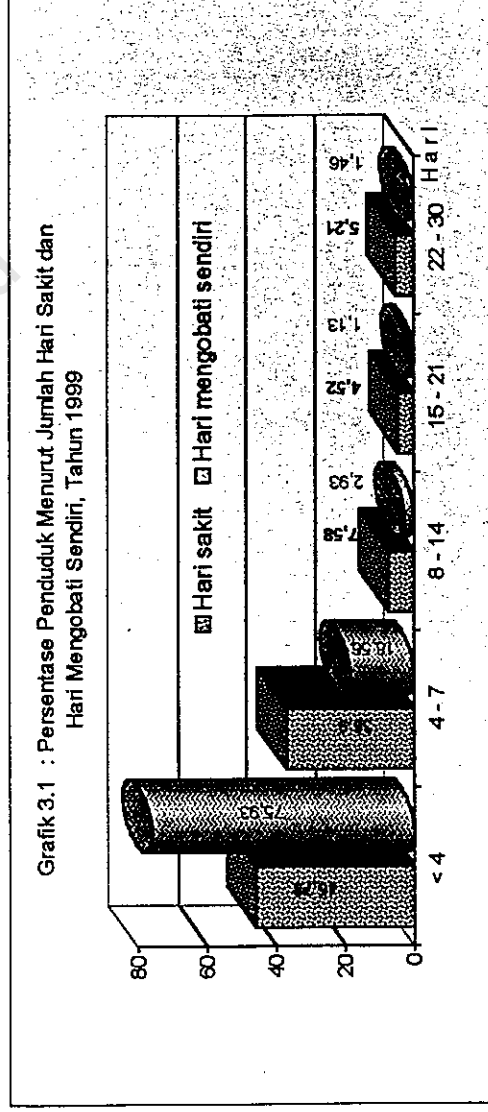
*Jenis alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) adalah suntikan, yaitu mencapai sekitar 36,97 persen.*

<https://jatim.bps.go.id>

Derajat kesehatan penduduk pada masa balita hingga usia sekolah sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan proses belajarnya. Selanjutnya pada masa dewasa hingga lansia, derajat kesehatan masyarakat akan mempengaruhi tingkat aktifitas dan produktifitasnya. Dengan demikian masalah kesehatan harus tetap menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat, bahkan sejak bayi masih dalam kandungan.

### 3.1 Keluhan Utama Kesehatan dan Upaya Pengobatan

Untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat, dalam pelaksanaan Susenas didekati melalui keluhan kesehatan penduduk selama sebulan yang lalu. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 1999 diantara sekitar 34,89 juta jiwa penduduk Propinsi Jawa Timur, sekitar 8,96 juta jiwa atau seperempatnya (25,67 persen penduduk) menyatakan mengalami keluhan kesehatan. Selanjutnya diantara yang mengalami keluhan kesehatan tersebut sekitar 61,36 persen menyatakan berupaya melakukan pengobatan sendiri yaitu dengan cara minum obat modern, obat tradisional dan obat lainnya, ataupun gabungan diantara ketiganya. Adapun yang berobat jalan sekitar 46,92 persen, seperti ke Puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktek, bidan, petugas kesehatan, tabib/sinse/dukun dan lain-lain. Diantara yang berobat jalan tersebut bisa jadi mereka juga melakukan pengobatan sendiri.



Pada Grafik 3.1, jika penduduk yang mengalami keluhan kesehatan diperhatikan menurut lamanya sakit maka sekitar 45,78 persen menyatakan sakit selama kurang dari 4 hari, selanjutnya 36,90 persen menyatakan selama 4-7 hari dan selebihnya sekitar 17,31 persen menyatakan sakit selama lebih dari satu minggu. Selanjutnya apabila diperhatikan menurut upaya pengobatan sendiri, maka sekitar 75,93 persen menyatakan mengobati sendiri selama kurang dari 4 hari, sekitar 18,56 persen mengobati sendiri antara 4-7 hari dan selebihnya sekitar 5,52 persen lebih dari satu minggu.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persentase yang cukup tajam antara jumlah hari sakit dengan jumlah hari mengobati sendiri. Secara umum bisa dikatakan jumlah hari mengobati sendiri lebih pendek dibanding hari sakit. Perilaku ini bisa terjadi antara lain diduga penduduk sudah menghentikan pengobatan sendiri bila dirasa kondisi kesehatannya sudah membaik sekalipun belum sepenuhnya sembuh, atau menghentikan pengobatan sendiri untuk dilanjutkan dengan berobat jalan dan dalam kondisi yang lebih parah mungkin dilanjutkan dengan rawat inap.

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan apabila diperhatikan menurut jenis keluhannya, sebagaimana tahun sebelumnya jenis keluhan yang terbanyak adalah untuk kelompok penyakit Influenza, antara lain keluhan pilek mencapai sekitar 46,69 persen, keluhan batuk mencapai sekitar 45,99 persen, keluhan panas mencapai sekitar 39,33 persen dan keluhan sakit kepala berulang sekitar 17,21 persen. Sedangkan keluhan yang paling sedikit dialami penduduk adalah sakit telinga berair atau congek yaitu hanya sekitar 0,20 persen.

*Pada tahun 1998 sekitar sepertiga penduduk Propinsi Jawa Timur mengalami keluhan/gangguan kesehatan, selanjutnya pada tahun 1999 menurun menjadi sekitar seperempat dan jumlah penduduk.*

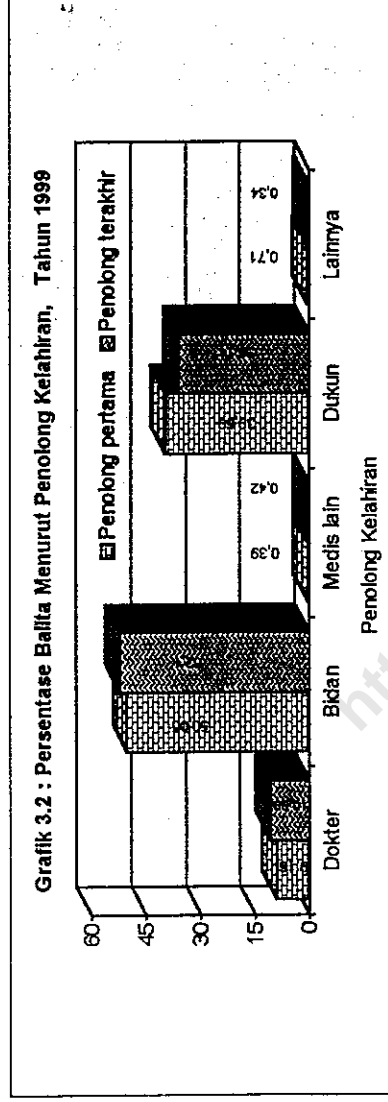
### **3.2 Kesehatan Balita**

Anak usia dibawah lima tahun atau yang disebut dengan Balita, merupakan kelompok penduduk yang paling rentan terhadap masalah kesehatan, kekurangan gizi dan infeksi yang apabila tidak ditangani secara dini bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidupnya. Beberapa indikator kesehatan balita yang dikumpulkan dalam Susenas antara lain penolong kelahiran, pemberian ASI dan Imunisasi



### a. Penolong Kelahiran

Data tentang penolong kelahiran/persalinan dianggap penting karena persalinan yang tidak dilakukan oleh ahlinya seringkali berakibat fatal bagi kelangsungan hidup bayi maupun ibunya. Oleh karena itu persalinan hendaknya dilakukan oleh tenaga medis karena mereka sudah dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan akan ilmu kebidanan secara memadai.



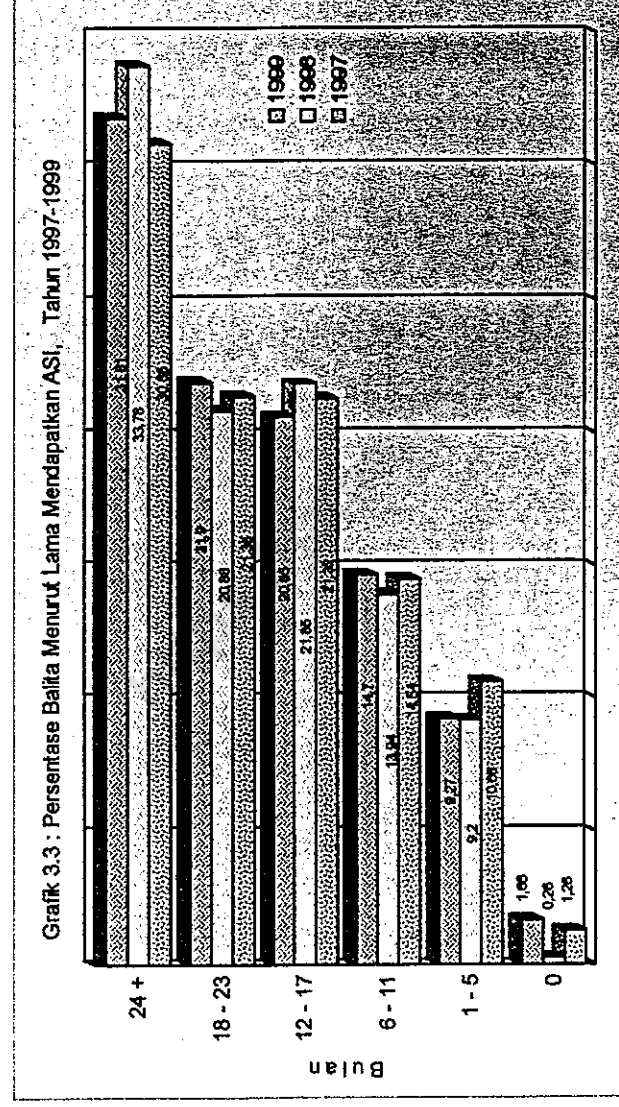
Menurut data Susenas 1999, diantara sekitar 2,83 juta jiwa balita di Propinsi Jawa Timur, sekitar 59,50 persen diantaranya penolong pertama kelahirannya dilakukan oleh tenaga medis, antara lain oleh bidan mencapai sekitar 50,05 persen, dokter sekitar 9,16 persen dan tenaga medis lain sekitar 0,39 persen. Sedangkan untuk penolong pertama kelahiran oleh tenaga bukan medis seperti dukun dan lainnya mencapai sekitar 40,40 persen. Selanjutnya untuk penolong terakhir kelahiran oleh tenaga medis mencapai sekitar 62,74 persen antara lain oleh bidan mencapai sekitar 51,79 persen, tenaga dokter mencapai sekitar 10,55 persen dan tenaga medis lain sekitar 0,40 persen. Sedangkan untuk penolong kelahiran oleh tenaga bukan medis mencapai sekitar 36,38 persen.

Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, penolong terakhir kelahiran oleh tenaga bukan medis khususnya oleh dukun, menunjukkan adanya penurunan yang cukup berarti yaitu dari sekitar 41,10 persen pada tahun 1998 menurun menjadi 36,14 persen pada tahun 1999.

*Penolong terakhir kelahiran oleh tenaga dukun menurun cukup tajam, yaitu dari sekitar 41,10 persen pada tahun 1998 menurun menjadi sekitar 36,14 persen pada tahun 1999 atau terjadi penurunan sekitar 4,96 persen poin.*

## b. Pemberian ASI

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber makanan yang utama dan terbaik bagi bayi, karena ASI mengandung zat-zat yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Disamping itu, ASI juga mengandung zat yang bisa memberikan kekebalan pada tubuh bayi terhadap serangan penyakit ringan. Namun demikian yang perlu diperhatikan, untuk mendapatkan ASI yang memiliki kualitas gizi baik dan dalam kuantitas/volume yang cukup, bagi ibu yang menyusui harus selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan dalam porsi yang memadai. Disamping itu kualitas dan volume makanan yang dikonsumsi juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu yang bersangkutan.



Pada tahun 1999 dari sekitar 2,83 juta balita di Jawa Timur, sekitar 98,34 persen diantaranya pernah mendapatkan ASI. Dibandingkan dengan keadaan tahun 1998 ternyata mengalami penurunan sekitar 1,4 persen poin. Kemudian apabila diperhatikan menurut lamanya mendapatkan ASI, maka yang mendapatkan ASI sampai dengan 5 bulan tercatat sekitar 9,27 persen, selanjutnya selama 6-11 bulan mencapai 14,70 persen, selama 12-23 bulan sekitar 42,55 persen dan yang mendapatkan ASI hingga 24 bulan atau lebih mencapai sekitar 31,81 persen. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, untuk yang mendapatkan ASI selama 12 bulan atau lebih terjadi penurunan dan sebaliknya untuk yang mendapatkan ASI selama kurang dari satu tahun justru mengalami peningkatan.

Lebih lanjut perlu diperhatikan juga bahwa pemberian ASI terbaik adalah pemberian ASI eksklusif, yaitu hanya memberikan ASI tanpa makanan/minuman tambahan sampai bayi berusia 4 bulan. Pada tahun 1999 rata-rata bayi usia 0-1 tahun mendapatkan ASI sekitar 10,54 bulan, yaitu selama 1,56 bulan mendapatkan ASI tanpa makanan/minuman tambahan dan sekitar 7,98 bulan mendapatkan ASI disertai makanan/minuman tambahan. Adapun bagi balita berusia 2-4 tahun rata-rata mendapatkan ASI selama sekitar 22,26 bulan, yaitu selama 3,3 bulan mendapatkan ASI tanpa makanan/minuman tambahan dan sekitar 18,96 bulan mendapatkan ASI disertai makanan/minuman tambahan.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 1999 balita di Jawa Timur rata-rata mendapatkan ASI eksklusif selama kurang dari 4 bulan. Keadaan ini lebih rendah dibanding kondisi tahun sebelumnya yang sudah mencapai sekitar 4 bulan.

*Pada tahun 1998 pada umumnya Balita di Jawa Timur sudah mendapatkan ASI eksklusif (tanpa makanan/minuman tambahan) selama sekitar empat bulan, tetapi pada tahun 1999 justru mengalami penurunan yaitu menjadi sekitar 3,3 bulan.*

### c. Imunisasi

Pemberian imunisasi/vaksinasi pada balita dimaksudkan untuk memberikan kekebalan buatan dalam tubuh anak terhadap beberapa jenis penyakit, yaitu dengan cara memasukkan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh anak, baik melalui suntikan maupun tetesan di mulut/diminum.

Tabel 3.1  
Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi, Jawa Timur, Tahun 1998 - 1999

Jenis Imunisasi	1998	1999	Perubahan Persen (Poin)
BCG	91,14	96,32	5,18
DPT - 1 X	18,25	17,61	(0,64)
DPT - 2 X	9,86	13,15	3,29
DPT - 3 X	64,76	63,20	(1,56)
Polio - 1 X	18,24	16,67	(1,57)
Polio - 2 X	12,20	12,44	0,24
Polio - 3 X +	62,88	65,52	2,64
Campak	78,03	77,30	(0,73)

Sumber : Susenas 1998 dan 1999  
Catatan : Menurut catatan di Kartu Menuju Sehat (KMS)

Berdasarkan data Susenas 1999 diketahui bahwa diantara 2,83 juta balita di Jawa Timur ternyata sekitar 96,32 persen diantaranya sudah mendapatkan imunisasi BCG, sekitar 93,96 persen sudah mendapatkan imunisasi DPT, sekitar 94,63 persen mendapatkan imunisasi polio dan sekitar 77,3 persen mendapatkan imunisasi Campak.

Adapun untuk imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bertahap. Untuk imunisasi DPT dikatakan lengkap apabila diberikan sebanyak 3 kali dan untuk polio dikatakan lengkap apabila diberikan minimal sebanyak 3 kali. Pada tahun 1999 tercatat balita yang mendapatkan imunisasi DPT lengkap mencapai sekitar 63,20 persen dan yang mendapatkan imunisasi polio lengkap mencapai sekitar 65,52 persen. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa masih cukup banyak balita di Propinsi Jawa Timur yang belum mendapatkan imunisasi DPT maupun Polio secara lengkap.

*Diantara 2,83 juta balita di Jawa Timur ternyata sekitar 96,32 persen sudah mendapatkan imunisasi BCG, sekitar 93,96 persen sudah mendapatkan imunisasi DPT, sekitar 94,63 persen mendapatkan imunisasi polio dan sekitar 77,3 persen mendapatkan imunisasi Campak.*

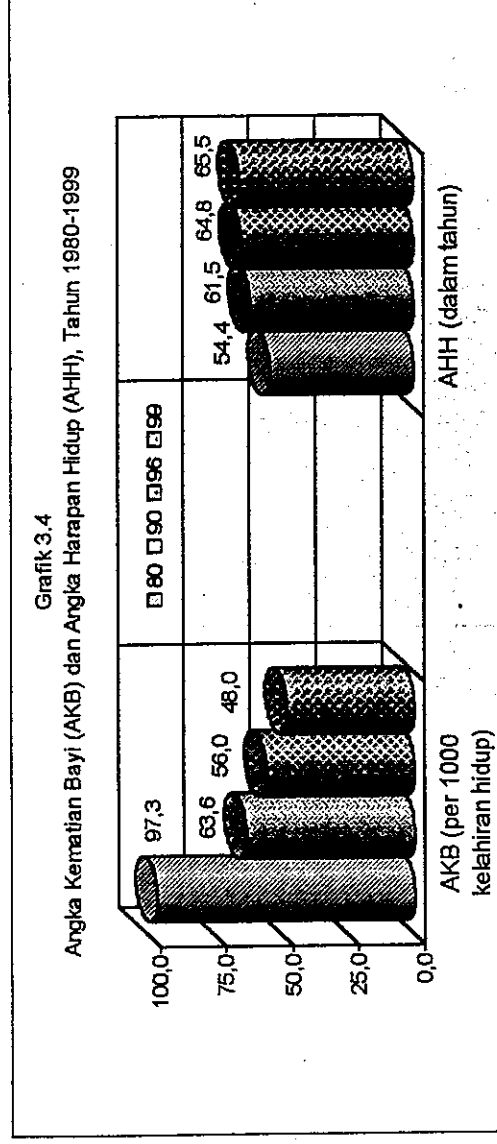
### 3.3 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan sekaligus juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan kematian bayi memang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hasil Susenas 1999 menunjukkan bahwa AKB di Jawa Timur sebesar 48. Artinya untuk setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 48 bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 1998 yang sebesar 51 per 1000 kelahiran hidup. Bahkan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 1980 AKB tahun 1999 hanya sekitar separuhnya.

Jika diperhatikan menurut daerah tingkat II di propinsi Jawa Timur, pada tahun 1999 terdapat rentang AKB yang cukup tinggi yaitu antara 28 – 86 per 1000 kelahiran hidup. Daerah tingkat II yang mempunyai AKB terendah adalah Kabupaten Tulungagung, sedangkan yang mempunyai AKB tertinggi adalah Kabupaten Sampang.

Banyak faktor yang mempengaruhi AKB. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi bahwa gizi buruk dan sanitasi/lingkungan yang berkualitas rendah, antara lain merupakan faktor penyebab tingginya angka kematian bayi.



Disamping AKB, indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk suatu wilayah adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Semakin tinggi AHH berarti semakin tinggi kualitas hidup penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 1999 angka harapan hidup penduduk Jawa Timur diperkirakan mencapai 65,5 tahun, tidak berbeda dengan AHH tahun 1998. Sedangkan apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 1980 terjadi peningkatan sekitar 12 tahun.

*Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 1980 sebesar 97 per 1000 kelahiran hidup, selanjutnya menurun menjadi sekitar separuhnya pada tahun 1999. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 1980 sekitar 54 tahun dan pada tahun 1999 meningkat menjadi sekitar 65,5 tahun.*

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan sekaligus juga merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir logis. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, diharapkan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap, memilih, beradaptasi ataupun mengembangkan segala bentuk informasi dan pengetahuan baru, untuk kehidupannya.

#### 4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu dasar utama bagi seseorang dalam upayanya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan adalah kemampuan membaca dan menulis atau disebut juga dengan melek huruf. Hal ini dikarenakan sebagian besar informasi dan ilmu pengetahuan disajikan melalui media tulisan, seperti buku ilmiah, buku pelajaran, literatur, majalah, koran, paper, jurnal dan lain-lain.

Tabel 4.1  
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan  
Membaca dan Menulis, Jawa Timur, Tahun 1998-1999

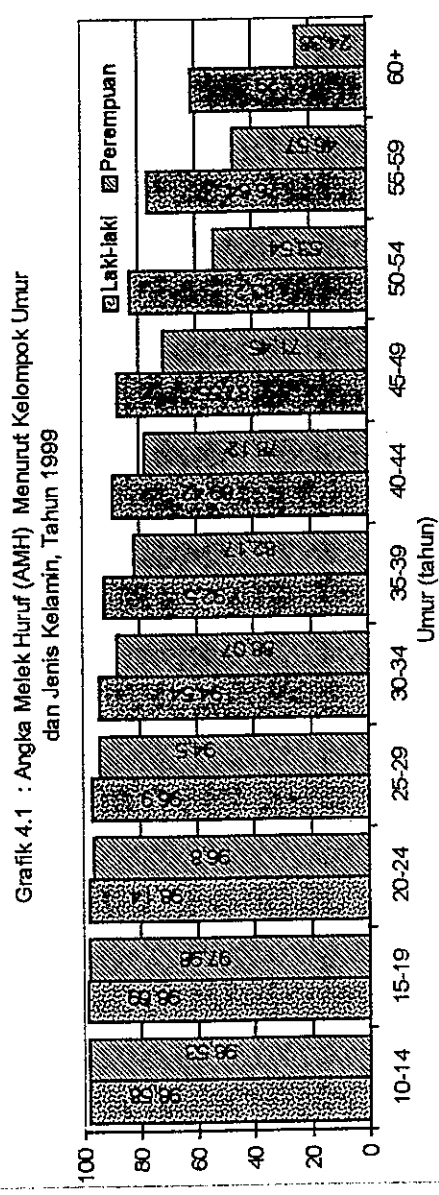
Kemampuan Baca/tulis	1998	1999	Perubahan 1998-1999 (persen poin)
<b>Melek Huruf</b>			
Laki-laki	89,65	89,83	0,18
Perempuan	76,81	77,14	0,33
L + P	83,00	83,31	0,31
<b>Buta Huruf</b>			
Laki-laki	10,35	10,17	(0,18)
Perempuan	23,19	22,86	(0,33)
L + P	17,00	16,69	(0,31)

Sumber : Susenas 1998 dan 1999

Catatan : Angka dalam tanda "(...)" menunjukkan minus

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dalam Angka Melek Huruf (AMH), yaitu persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Menurut data Susenas (Tabel 4.1) diketahui bahwa pada tahun 1999 diantara 100 penduduk usia 10 tahun keatas ternyata sekitar 83,31 diantaranya adalah melek huruf. Dibandingkan dengan kondisi tahun 1998 terjadi peningkatan sebesar 0,31 persen poin. Menurut jenis kelamin, tampak bahwa pada

tahun 1999 AMH laki-laki lebih tinggi dibanding AMH perempuan, yaitu AMH laki-laki sebesar 89,83 persen sedangkan AMH perempuan sebesar 77,14 persen.



Selanjutnya apabila kita perhatikan Grafik 4.1, AMH menurut kelompok umur ternyata memperlihatkan kecenderungan semakin muda kelompok umur, AMH-nya semakin mendekati 100 persen. Disamping itu, sekalipun pada semua kelompok umur AMH laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, tetapi ternyata semakin muda kelompok umur tampak adanya kecenderungan semakin menggeciinya perbedaan AMH menurut jenis kelamin. Dengan demikian bisa diprediksikan bahwa di Propinsi Jawa Timur dalam beberapa dasawarsa yang akan datang, hampir semua pemuda dan penduduk dewasa baik laki-laki maupun perempuan, sudah melek huruf.

*Semakin muda usia penduduk Propinsi Jawa Timur, Angka Melek Huruf (AMH) semakin mendekati angka 100 dan menunjukkan kecenderungan semakin memipisnya perbedaan antara AMH laki-laki dengan AMH perempuan.*

## 4.2 Partisipasi Sekolah

Banyaknya penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah bisa diketahui melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu angka perbandingan antara penduduk yang masih sekolah dalam kelompok usia sekolah tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama.

APS untuk kelompok umur sekolah dasar (7-12 tahun) pada tahun 1999 adalah sebesar 95,41 persen yang berarti untuk setiap 100 anak usia sekolah dasar sekitar 95 anak diantaranya sedang sekolah dan sekitar 5 anak tidak duduk dibangku sekolah. Hal



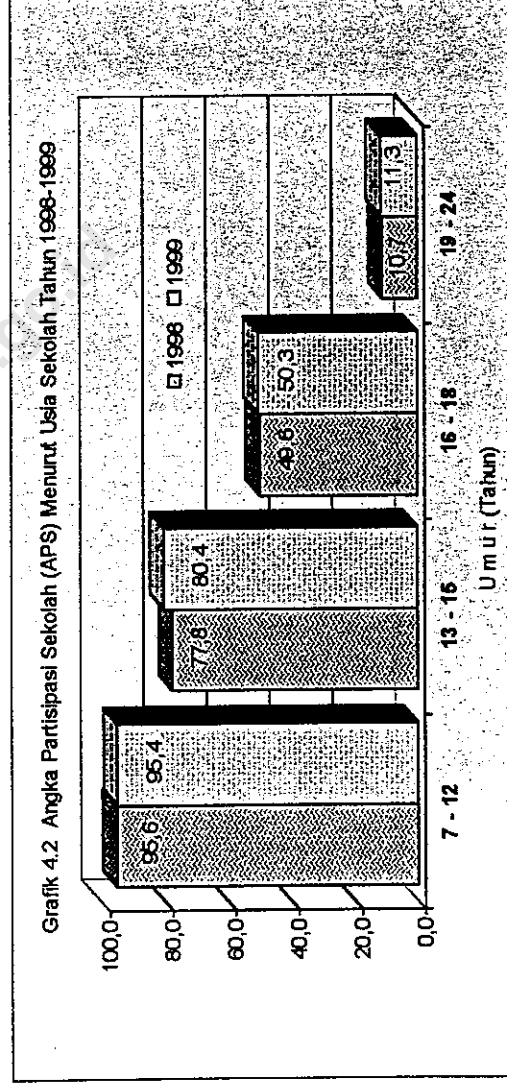
lain yang juga menarik, ternyata APS untuk usia pra sekolah (5-6 tahun) mencapai sekitar 21,66 persen, atau sekitar 22 anak diantara 100 anak usia pra sekolah sudah duduk di bangku sekolah formal (bukan Taman Kanak-kanak).

Tabel 4.2  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut kelompok usia sekolah,  
Jawa Timur, Tahun 1999

Kelompok usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	L + P
5 - 6	21,41	21,95	21,66
7 - 12	95,39	95,44	95,41
13 - 15	80,36	80,52	80,44
16 - 18	53,46	47,03	50,29
19 - 24	12,49	10,23	11,31
25 +	0,44	0,17	0,30

Sumber : Susenas 1999

Selanjutnya APS untuk usia SMTP (13-15 tahun) sebesar 80,44 persen, APS untuk usia SMTA (16-18 tahun) sebesar 50,29 persen dan APS untuk usia perguruan tinggi (19-24 tahun) mencapai sekitar 11,31 persen. Adapun APS untuk usia 25 tahun atau lebih mencapai sekitar 0,30 persen.



Apabila diperhatikan APS untuk semua kelompok usia sekolah, tampak bahwa semakin tinggi usia sekolah Angka Partisipasi Sekolah-nya semakin kecil. Namun demikian sebenarnya untuk usia SMTP atau lebih dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya peningkatan APS sebagaimana tampak pada Grifik 4.2 Lebih lanjut APS apabila



disimak menurut jenis kelamin, menunjukkan adanya kecenderungan semakin muda usia sekolah perbedaan APS antara laki-laki dengan APS perempuan tampak semakin kecil, bahkan pada tahun 1999 untuk usia prasekolah, SD dan SMTP APS untuk perempuan lebih besar dibanding APS laki-laki.

*Semakin muda usia penduduk Propinsi Jawa Timur, Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin tinggi dan menunjukkan kecenderungan semakin menipisnya perbedaan antara APS laki-laki dengan APS perempuan.*

### 4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Persentase penduduk yang menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu merupakan salah satu cerminan tingkat intelektualitas penduduk suatu daerah. Semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan yang semakin tinggi, bisa dianggap semakin tinggi tingkat intelektual penduduk daerah tersebut.

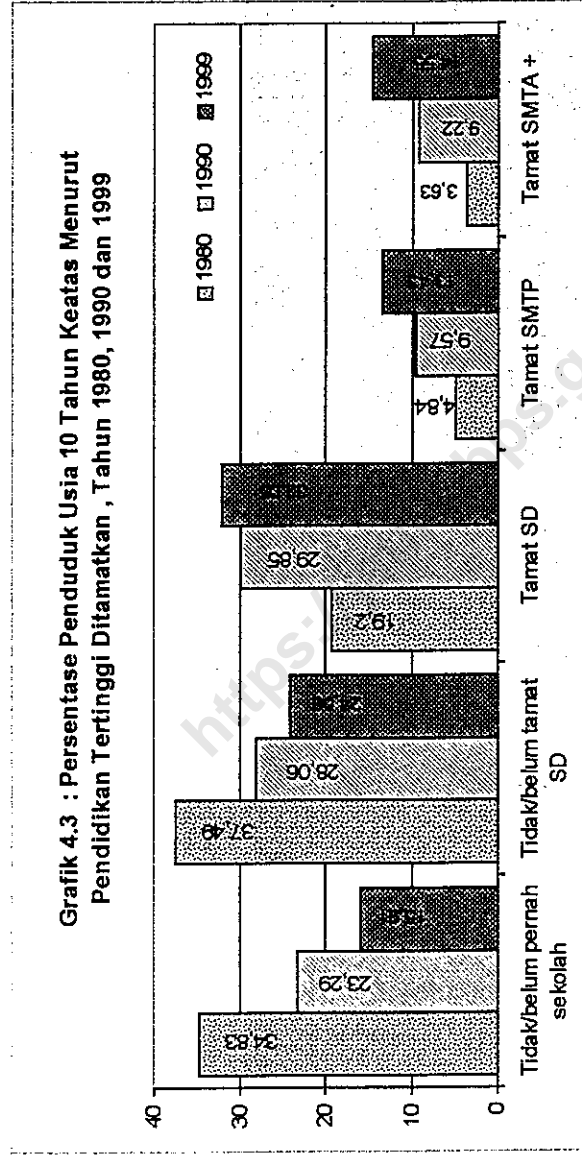
Tabel 4.3  
**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut  
 Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin,  
 Propinsi Jawa Timur, Tahun 1999**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	L + P
Tidak/belum pernah sekolah	9,77	21,72	15,91
Tidak/belum tamat SD	24,33	23,80	24,06
Tamat SD	33,88	30,31	32,05
Tamat SMTP	14,72	12,22	13,43
Tamat SMTA +	17,3	11,96	14,55
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 14.110,7	100,00 14.908,6	100,00 29.019

Sumber : Susenas 1999

Menurut data Susenas 1999, diketahui bahwa diantara 100 penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sekitar 16 orang, tidak/belum tamat SD sekitar 24 orang, tamat SD dan SMTP sekitar 45 orang dan tamat SMTA keatas sekitar 15 orang. Menurut jenis kelamin tampak bahwa untuk semua jenjang pendidikan persentase perempuan lebih kecil dibanding laki-laki dan semakin tinggi jenjang pendidikan tampak semakin besar angka perbedaannya antara laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut persentase penduduk yang menamatkan suatu jenjang pendidikan pada tahun 1999 apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 1980 dan tahun 1990 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup berarti, sebagaimana tampak pada Grafik 4.3. Pada tahun 1980 penduduk usia 10 tahun keatas yang tamat SD hanya mencapai 19,20 persen dan yang tamat SMTP keatas sebesar 8,47 persen, selanjutnya pada tahun 1990 yang tamat SD meningkat menjadi 29,85 persen dan yang tamat SMTP menjadi 18,79 persen. Kemudian pada tahun 1999 yang tamat SD mencapai 32,05 persen dan yang menamatkan jenjang pendidikan SMTP keatas meningkat cukup berarti yaitu menjadi 27,98 persen.



Peningkatan penduduk usia 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, seperti halnya tidak terlepas dari adanya berbagai kebijakan di bidang pendidikan seperti gerakan wajib belajar 6 tahun yang selanjutnya ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Disamping itu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga semakin berkembangnya aspirasi masyarakat menyangkut akan pentingnya pendidikan diperkirakan juga menjadi pemicu akan keberhasilan tersebut.

*Penduduk usia 10 tahun keatas yang menamatkan jenjang pendidikan SMTP atau lebih semakin meningkat, yaitu dari 8,47 persen pada tahun 1980 meningkat menjadi 18,79 persen pada tahun 1990 dan terakhir pada tahun 1999 meningkat menjadi 29,76 persen.*

Data ketenagakerjaan berperan sangat penting dalam pembangunan, antara lain sebagai bahan perencanaan dalam penyusunan kebijakan bidang ketenagakerjaan, seperti pengembangan ketrampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Faktor-faktor terpenting yang perlu diperhatikan adalah keadaan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan utama dan jumlah jam kerja.

### 5.1 Angkatan Kerja

Menurut data hasil Susenas 1999 diantara sekitar 29,02 juta jiwa penduduk usia 10 tahun keatas, yang merupakan angkatan kerja sebanyak 17,56 juta jiwa atau sekitar 60,52 persen dan yang bukan merupakan angkatan kerja sebanyak 11,46 juta jiwa atau sekitar 39,48 persen. Dengan ukuran TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) menunjukkan angka sebesar 60,52 berarti dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 61 diantaranya termasuk dalam angkatan kerja, yaitu terdiri dari sekitar 95,05 persen penduduk yang bekerja, dan sisanya sekitar 4,95 persen merupakan pencari kerja.

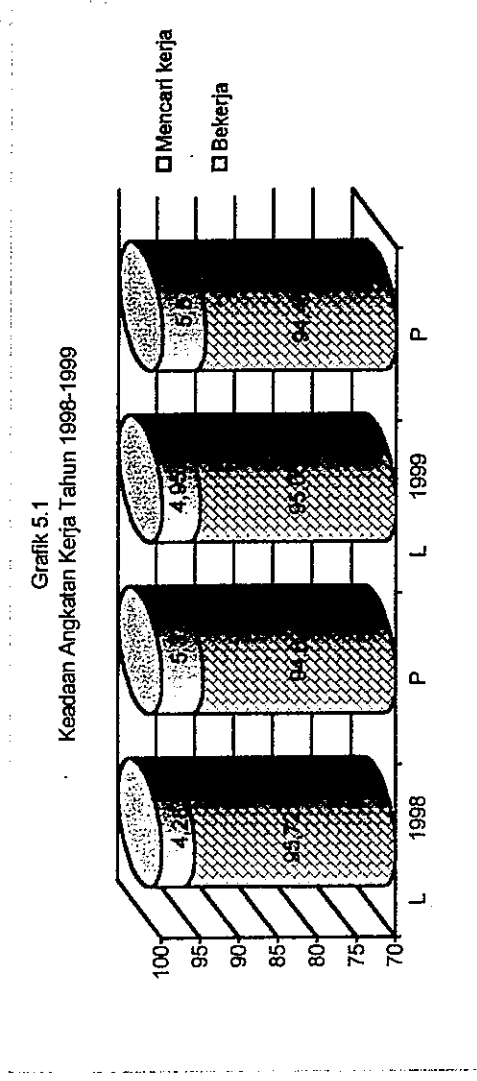
Tabel 5.1  
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Jawa Timur, Tahun 1998-1999

Kegiatan Utama	1998			1999		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Angkatan Kerja	75,30	46,13	60,20	75,54	46,31	60,52
Bekerja	72,08	43,65	57,36	72,09	43,73	57,52
Mencari Kerja	3,22	2,48	2,84	3,45	2,58	3,00
Bukan Angkatan Kerja	24,70	53,87	39,80	24,46	53,69	39,48
Sekolah	16,93	14,67	15,76	16,52	14,57	15,52
Mengurus rumah tangga	1,23	32,87	17,61	1,04	32,65	17,28
Lainnya	6,54	6,33	6,43	6,90	6,47	6,68
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 (13.744)	100,00 (14.763)	100,00 (28.834)	100,00 (14.111)	100,00 (14.909)	100,00 (29.019)

Sumber: Susenas 1998 dan 1999

Pada tahun 1998 jumlah angkatan kerja sebanyak 17,2 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 95,29 persen diantaranya merupakan penduduk yang bekerja dan 4,71 persen adalah pencari kerja. TPAK tahun 1998 sebesar 60,19 yang berarti ada kenaikan sebesar

0,33 persen poin jika dibanding dengan TPAK tahun 1999. Dari gambaran tersebut jelas bahwa kenaikan persentase angkatan kerja tidak diikuti dengan kenaikan persentase penduduk yang bekerja.



Menurut jenis kelamin, tampak bahwa persentase penduduk laki-laki yang bekerja masih lebih tinggi jika dibanding dengan penduduk perempuan yang bekerja pada tahun 1998-1999. Sebaliknya persentase penduduk perempuan yang mencari pekerjaan, lebih tinggi dari penduduk laki-laki selama periode tersebut.

Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur, termasuk diantaranya adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berharap untuk bisa bekerja.

Besarnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 1998 sebesar 4,71 persen menjadi sebesar 4,95 persen tahun 1999 atau meningkat sebesar 0,25 persen poin. Komplemen dari TPT adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Besarnya TKK tahun 1998 adalah sebesar 95,29 persen dan menjadi sebesar 95,04 persen pada tahun 1999.

*Kenaikan jumlah angkatan kerja, tidak diikuti dengan kenaikan persentase penduduk yang bekerja.*

## 5.2 Lapangan Pekerjaan

Dari jumlah penduduk yang bekerja tahun 1999, jika dilihat dari sisi penyerapan menurut lapangan pekerjaan, sektor pertanian masih berada pada urutan teratas yaitu sebesar 46,18 persen. Selanjutnya sektor industri dan lainnya sebesar 22,32 persen, sektor perdagangan sebesar 18,80 persen, dan sektor jasa 12,70 persen.

Tabel 5.2  
 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja  
 Menurut Lapangan Usaha Utama, Jawa Timur, Tahun 1998 dan 1999

Lapangan Usaha	1998		1999			
	L	P	L+P	L	P	L+P
Pertanian Industri *)	48,20	45,22	47,04	47,94	43,34	46,18
Perdagangan	25,88	16,23	22,14	26,30	16,10	22,32
Jasa	12,39	25,43	17,45	13,11	27,68	18,80
	13,53	13,12	13,37	12,65	12,78	12,70
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 (9 880)	100,00 (6 265)	100,00 (16 145.)	100,00 (9 987)	100,00 (6 443)	100,00 (16 351)

Sumber: Susenas 1998 dan 1999

Catatan: \*) Industri mencakup sektor Pertambangan & Galian, Industri, Listrik Gas & Air, Konstruksi, Komunikasi, Keuangan dan Lainnya.

Dibandingkan dengan tahun 1998, pola penyerapan sektoral sama dengan tahun 1999, kendati ada pergeseran angka persentase seperti yang terlihat pada Tabel 5.2. Dari tabel tersebut nampak, sektor industri dan perdagangan mengalami peningkatan persentase. Namun demikian sektor pertanian masih menduduki peringkat teratas di Jawa Timur, meskipun mengalami penurunan persentase pada periode tahun 1998-1999. Tabel 5.2 juga memperlihatkan bahwa pada sektor perdagangan persentase wanita melebihi persentase laki-laki secara berarti pada kondisi dua tahun tersebut.

*Kendati mengalami penurunan persentase, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian masih menduduki peringkat teratas di Jawa Timur, pada periode 1998 - 1999.*

### 5.3 Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan menunjukkan macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Menurut jenis pekerjaan maka yang terbanyak adalah bekerja sebagai tenaga usaha pertanian yaitu sebesar 47,14 persen pada tahun 1998 dan menjadi sebesar 46,23 persen pada tahun 1999, atau menurun sebesar 0,91 persen poin. Tenaga penjualan pada tahun 1998 sebesar 16,95 persen, meningkat menjadi 17,60 persen pada tahun berikutnya.

Tabel 5.3  
 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja  
 Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Jawa Timur, Tahun 1998 dan 1999

Jenis Pekerjaan	1998			1999		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Tenaga Penjualan	12,25	24,19	16,95	12,29	25,88	17,60
Tenaga Usaha Pertanian	47,07	45,70	47,14	48,05	43,41	46,23
Pekerja Kasar Lainnya *)	16,89	2,91	11,38	16,52	2,79	11,15
Jumlah (ribuan jiwa)	22,79	27,20	24,53	23,14	27,92	25,01
	100,00 (9.907)	100,00 (6.443)	100,00 (16.351)	100,00 (10.172)	100,00 (6.519)	100,00 (16.691)

Sumber : Susenas 1998 dan 1999

Catatan \*) Lainnya meliputi Tenaga Profesional, Tenaga Kepemimpinan & Tatalaksana, Pejabat Pelaksana & TU, Tenaga Usaha Jasa, Tenaga Produksi, Tenaga Operator dan Lainnya

Menurut jenis kelamin tampak adanya perbedaan yang cukup tajam antara laki-laki dengan perempuan untuk jenis pekerjaan tenaga penjualan. Namun demikian baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan adanya peningkatan persentase pada tahun 1998-1999.

#### 5.4 Status Pekerjaan Utama

Dilihat dari status pekerjaan utama, tahun 1999 status pekerja keluarga mengalami kenaikan persentase, jika dibanding dengan keadaan tahun sebelumnya. Sementara status buruh mengalami penurunan persentase sebesar 0,03 persen poin dari 36,98 persen tahun 1998 menjadi 36,95 persen tahun 1999.

Status berusaha pada tahun 1999 secara persentase mengalami penurunan yang kurang berarti dibanding tahun 1998, yaitu sebesar 43,96 persen pada tahun 1998 menjadi 43,17 persen pada tahun 1999 atau menurun sebesar 0,79 persen poin.

Tabel 5.4  
 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang  
 Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Jawa Timur, Tahun 1998-1999

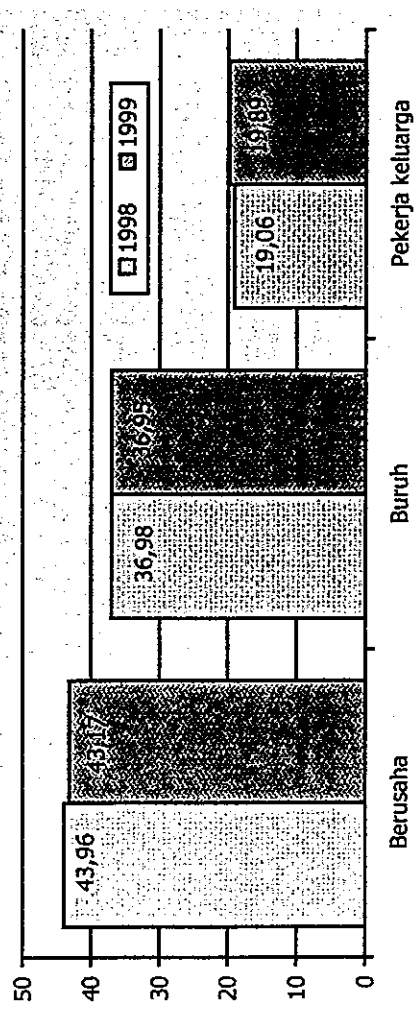
Status Pekerjaan	1998			1999		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Berusaha	50,28	34,25	43,96	48,54	34,78	43,17
Buruh	39,47	33,15	36,98	39,91	32,34	36,95
Pekerja Keluarga	10,25	32,60	19,06	11,56	32,89	19,89
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 (9.907)	100,00 (6.443)	100,00 (16.351)	100,00 (9.907)	100,00 (6.443)	100,00 (16.351)

Sumber : Susenas 1998 dan 1999

Catatan : Berusaha mencakup Berusaha sendiri & Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tetap.  
 Buruh mencakup Buruh/karyawan pemerintah, BUMN/BUMD dan Buruh/karyawan swasta.

Menurut jenis kelamin, persentase wanita dengan status berusaha ternyata mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen poin, yaitu sebesar 34,25 persen tahun 1998 menjadi 34,78 pada tahun 1999. Sebaliknya laki-laki yang berusaha mengalami penurunan sebesar 1,74 persen poin, yaitu sebesar 50,28 persen tahun 1998 menjadi sebesar 48,54 persen pada tahun 1999.

Grafik 5.2 Status Pekerjaan Utama, Tahun 1998-1999



Status pekerja keluarga pada tahun 1999 secara persentase, penduduk laki-laki mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 1998 sebesar 1,31 persen poin yaitu sebesar 10,25 persen tahun 1998 menjadi hanya 11,56 persen pada tahun 1999. Penduduk perempuan secara persentase juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,29 persen poin, dari 32,60 persen pada tahun 1998 menjadi 32,89 persen tahun 1999.

## 5.5 Jam Kerja

Pada tahun 1999 dilihat dari sisi jam kerja seluruhnya, penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah 35 jam per minggu mencapai 43,27 persen. Dibandingkan dengan tahun 1998 sebesar 43,25 persen berarti mengalami kenaikan sekitar 0,02 persen poin. Sebaliknya persentase penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja diatas 35 jam per minggu mengalami penurunan sebesar 1,66 persen poin, yaitu dari 54,46 persen tahun 1998 menjadi 52,80 persen pada tahun 1999.

Tabel 5.5  
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja  
Menurut Jam Kerja Seluruhnya, Jawa Timur, Tahun 1998 dan 1999

Jumlah Jam Kerja	1998			1999		
	L	P	L+P	L	P	L+P
0 *)	2,08	2,62	2,29	0*	3,76	4,19
< 35	35,98	54,39	43,25	< 35	37,38	52,47
≥ 35	61,94	42,99	54,46	≥ 35	58,86	43,34
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 (9.907)	100,00 (6.443)	100,00 (16.351)	100,00 (10.171)	100,00 (6.519)	100,00 (16.691)

Sumber: Susenas 1998 dan 1999

Catatan: \*) berarti punya pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu.

Lamanya jam kerja selama seminggu, secara rata-rata jam kerja menunjukkan adanya penurunan. Jika tahun 1998 sebesar 37,11 jam maka pada tahun 1999 menjadi 33,88. Rata-rata jam kerja tahun 1999 menurut jenis kelamin menunjukkan rata-rata jam kerja laki-laki lebih tinggi dibanding jam kerja perempuan yaitu sebesar 38,58 jam per minggu untuk laki-laki dan sebesar 36,75 jam per minggu untuk perempuan.



Dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, rumah didefinisikan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sehingga fungsi rumah bukan hanya sebagai tempat berlindung tetapi juga sebagai tempat untuk istirahat, beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, sosialisasi dengan lingkungan serta tempat untuk mendidik anak-anak. Sehingga keadaan rumah haruslah nyaman, aman, lapang serta berada dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Data Susenas 1999 menyajikan beberapa indikator yang menyangkut kualitas bangunan dan fasilitas tempat tinggal.

### 6.1 Kualitas Bangunan Tempat Tinggal

Kualitas bangunan tempat tinggal sangat berpengaruh pada keamanan, kenyamanan dan kesehatan anggota rumah tangga. Berkaitan dengan kualitas rumah ada tiga syarat agar suatu rumah dapat disebut sebagai **rumah permanen**, yaitu sebagian besar lantainya bukan tanah, sebagian besar dindingnya bukan anyaman bambu & bukan pelepah, serta sebagian besar atapnya bukan daun-daunan.

Tabel 6.1  
Persentase Rumah tangga Menurut Kualitas Perumahan, Jawa Timur  
Tahun 1998-1999

Kualitas Perumahan	1998	1999	Perubahan 1998-1999 (Persen Poin)
Luas lantai $\geq$ 50 meter persegi	64,93	66,47	1,54
Lantai Layak *)	70,33	71,65	1,32
Dinding tembok	65,11	67,79	2,68

Sumber : Susenas 1998 dan 1999  
Keterangan :\*) Mencakup lantai marmer/keramik, ubin/tegel, semen/bata merah.

Luas lantai dapat digunakan sebagai ukuran seberapa luas ruang gerak anggota rumah tangga. Data Susenas 1999 mengungkapkan bahwa persentase rumah tangga

yang menempati rumah dengan luas lantai 50 meter persegi atau lebih sebesar 66,47 persen, keadaan ini meningkat sekitar 1,54 persen poin dibanding kondisi tahun 1998.

Untuk jenis lantai layak (meliputi lantai marmer/keramik, ubin/tegel, semen/bata merah) mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 1998 persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai layak sebesar 70,33 persen meningkat menjadi 71,65 persen pada tahun 1999 atau terjadi peningkatan sebesar 1,32 persen poin.

Adapun persentase rumah tangga yang menempati rumah berdingding tembok mengalami peningkatan sebesar 2,68 persen poin, yaitu dari 65,11 persen pada tahun 1998 meningkat menjadi 67,79 persen pada tahun 1999. Sedangkan yang menempati rumah beratap layak, yaitu atap yang tidak terbuat dari daun-daunan meliputi seluruh rumah tangga yaitu sekitar 99,95 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan tahun 1998.

Secara keseluruhan bisa diketahui bahwa sekitar 6 diantara 10 rumah tangga di Jawa Timur sudah menempati rumah layak huni, yaitu rumah dengan luas lantai 50 meter persegi atau lebih, lantai bukan tanah, berdingding tembok dan atap bukan daun-daunan.

*Sekitar 6 diantara 10 rumah tangga di Jawa Timur menempati rumah layak huni*

## 6.2 Fasilitas Tempat Tinggal

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan selain kualitas tempat tinggal adalah fasilitas tempat tinggal seperti sumber penerangan, sumber air minum dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja.

Tahun 1999 persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik menunjukkan angka sebesar 92,35 persen atau meningkat sekitar 4,46 persen poin dibanding kondisi tahun 1998.

Selanjutnya penggunaan air minum rumah tangga dari sumber air leding sampai saat ini masih mencapai hampir 20 persen. Pada tahun 1998 sebesar 19,51 persen meningkat menjadi 19,95 persen pada tahun 1999.

Rumah tangga yang menggunakan tempat buang air besar dengan penampungan akhir tangki septik menunjukkan peningkatan, yaitu dari 29,35 persen pada tahun 1998 meningkat menjadi 32,54 persen di tahun 1999.

**Tabel 6.2**  
**Persentase Rumah tangga menurut fasilitas Perumahan, Jawa Timur**  
**Tahun 1998-1999**

Fasilitas Perumahan	1998	1999	Perubahan 1998-1999 (Persen Poin)
Penerangan Listrik	87,69	92,35	4,66
Air minum leding	19,51	19,95	0,44
Penampungan kotoran tangki septik	29,35	32,54	3,19
Jarak Penampungan akhir kotoran/tinja terhadap sumber air $\geq$ 10 meter	65,24	67,53	2,29

Sumber : Susenas 1997 dan 1998

Faktor berikutnya yang perlu juga diperhatikan adalah jarak antara tempat penampungan akhir tinja/kotoran terhadap sumber air minum, agar terbebas dari kontaminasi penyakit yang bersumber dari tinja/kotoran. Jarak yang ideal adalah 10 meter atau lebih.

Data Susenas 1999 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang jarak antara tempat penampungan akhir tinja/kotoran terhadap sumber air minum diatas 10 meter menunjukkan kenaikan. Tahun 1998 sebesar 65,24 persen ternyata pada tahun 1999 naik menjadi 67,53 persen atau meningkat sebesar 2,29 persen poin. Dengan demikian dapat diartikan, kesehatan lingkungan tampaknya meningkat dari segi kualitasnya.

*Selama tahun 1998-1999, jarak tempat penampungan akhir kotoran/tinja terhadap sumber air minum diatas 10 meter mengalami peningkatan.*

Dampak adanya krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 masih terasa sampai saat ini. Tingkat harga yang belum stabil dan menunjukkan kecenderungan terus meningkat, tetap menjadi beban ekonomi yang tidak ringan bagi sebagian besar penduduk.

### 7.1 Distribusi Pengeluaran

Belum pulihnya kondisi perekonomian dan terus meningkatnya harga untuk sebagian besar kebutuhan pokok penduduk, telah menyebabkan pergeseran yang sangat tajam terhadap tingkat pengeluaran penduduk, yaitu dari pengeluaran rendah bergeser ke pengeluaran menengah dan tinggi.

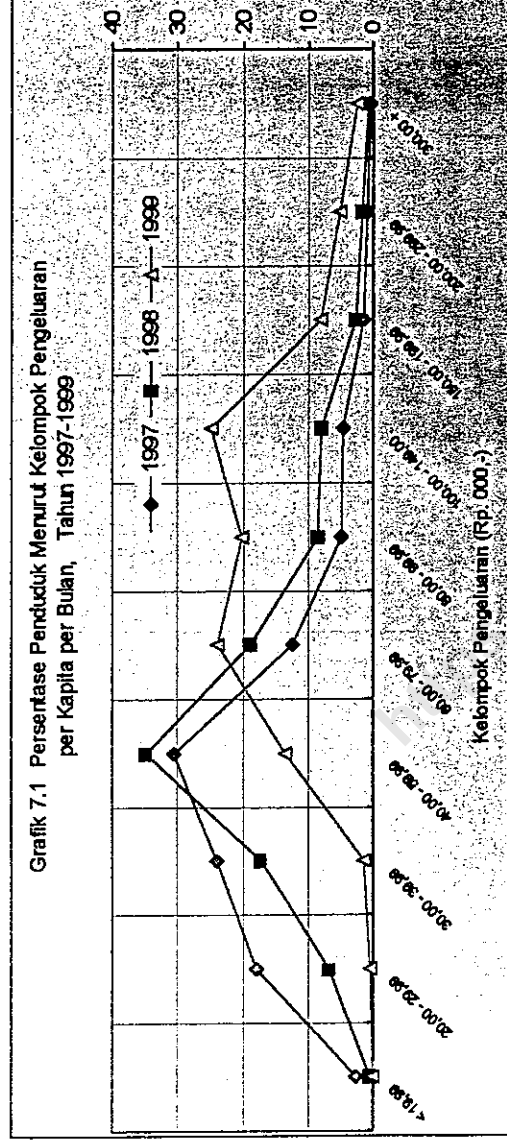
Tabel 7.1  
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita per Bulan,  
Propinsi Jawa Timur, Tahun 1997-1999

Kelompok Pengeluaran (Rp.)	1997	1998 *)	1999	Perubahan (Persen Poin)	
				1997-1998	1998-1999
≤ 19.999	2,73	0,55	0,01	(2,18)	(0,54)
20.000 – 29.999	17,92	6,74	0,32	(11,18)	(6,42)
30.000 – 39.999	24,04	17,32	1,40	(6,72)	(15,92)
40.000 – 59.999	30,53	34,85	13,64	4,32	(21,21)
60.000 – 79.999	12,39	18,95	23,89	6,56	4,94
80.000 – 99.999	4,98	8,60	20,25	3,62	11,65
100.000 – 149.999	4,68	7,98	24,83	3,3	16,85
150.000 – 199.999	1,53	2,72	8,11	1,19	5,39
200.000 – 299.999	0,87	1,69	5,14	0,82	3,45
300.000 +	0,36	0,61	2,41	0,25	1,80
Jumlah (ribuan jiwa)	100,00 (34.156)	100,00 (34.550)	100,00 (34.899)		

Sumber : Susenas 1998 dan 1999 (keadaan sekitar bulan Januari)  
Keterangan : \*) Angka diperbaiki

Menurut data Susenas, pada tahun 1997 persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita sebulan kurang dari Rp. 30.000,- tercatat sekitar 20,65 persen, selanjutnya pada tahun 1998 menurun menjadi 7,29 persen dan tahun 1999 menurun

lagi menjadi hanya 0,33 persen. Penurunan persentase yang sangat tajam untuk penduduk pada golongan pengeluaran rendah ini diikuti dengan kenaikan persentase penduduk pada golongan pengeluaran yang lebih tinggi. Pergeseran tingkat pengeluaran yang sangat tajam terjadi pada tahun 1999. Hal ini diduga merupakan dampak langsung adanya krisis ekonomi yang telah mengakibatkan melambungnya tingkat harga sebagian besar kebutuhan penduduk.



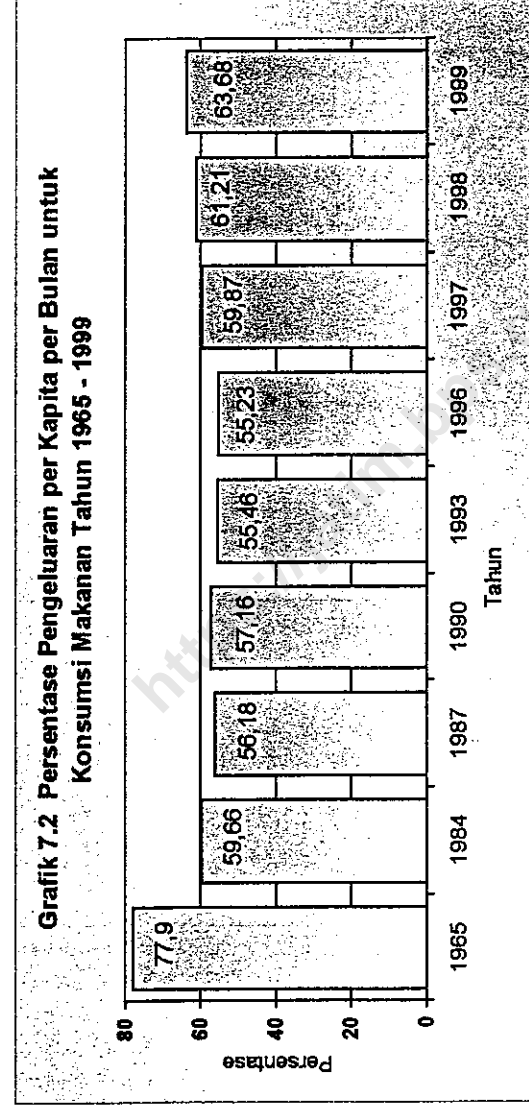
Lebih lanjut apabila diperhatikan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita per bulan selama tiga tahun terakhir, maka tampak pada tahun 1997 persentase tertinggi adalah pada golongan pengeluaran Rp. 40.000 – Rp 59.999 per kapita per bulan yaitu mencapai sekitar sepertiga penduduk (30,53 persen). Pada tahun 1998 persentase tertinggi tetap pada kelompok pengeluaran yang sama (mencapai sekitar 34,16 persen). Selanjutnya pada tahun 1999 terjadi tergeseran yang sangat tajam yaitu persentase tertinggi pada kelompok pengeluaran Rp. 60.000 - Rp. 79.999 hingga kelompok pengeluaran Rp. 100.000 – Rp. 149.999 yaitu mencapai hampir sekitar tujuh puluh persen dari penduduk Jawa Timur.

## 7.2 Pola Pengeluaran

Kenaikan harga yang sangat tajam untuk sebagian besar barang, tentunya juga akan menyebabkan meningkatnya pengeluaran penduduk. Pada tahun 1997 pengeluaran rata-rata per kapita sekitar Rp. 51.670,- per bulan dan pada tahun 1998 meningkat menjadi sekitar 64.105,- per bulan. Selanjutnya pada tahun 1999 meningkat menjadi hampir dua kali lipatnya yaitu mencapai sekitar Rp. 129.575,- per kapita per bulan.

Kenaikan pengeluaran yang sangat tajam tidak akan menjadi masalah serius apabila diiringi dengan adanya kenaikan pendapatan secara memadai. Tetapi dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, kenaikan pendapatan sangat sulit diharapkan, kecuali hanya oleh sebagian kecil penduduk yang memperoleh manfaat dengan adanya krisis ekonomi.

Sehingga bagi sebagian besar penduduk, kenaikan pengeluaran hanya bisa diatasi dengan jalan pengaturan pola konsumsi, seperti pengeluaran berdasarkan skala prioritas kebutuhan terutama mendahulukan kebutuhan akan pangan, menurunkan kualitas barang atau bahkan dalam kondisi yang sulit terpaksa harus menurunkan kuantitas/jumlah barang yang dikonsumsi.



Sebelum tahun 1997 pola konsumsi penduduk menunjukkan kecenderungan semakin menurunnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi kelompok makanan dan sebaliknya semakin meningkatnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan. Hal ini merupakan salah satu indikasi semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk. Tetapi sejak tahun 1997 ternyata persentase pengeluaran penduduk untuk makanan justru semakin meningkat, sebagaimana tampak pada Grafik 7.2.

Pada tahun 1996 persentase pengeluaran penduduk untuk kebutuhan makanan sekitar 55,23 persen, meningkat menjadi 59,87 persen pada tahun 1997, selanjutnya pada tahun 1998 meningkat menjadi 61,21 persen dan pada tahun 1999 semakin meningkat lagi yaitu menjadi sekitar 63,68 persen.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pergeseran pola pengeluaran yang terjadi diduga lebih merupakan dampak adanya kenaikan harga, dan bukan sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pada tahun 1964 proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan sekitar 77,9 persen terhadap total pengeluaran, selanjutnya pada tahun 1990 menurun menjadi 57,16 persen dan pada tahun 1996 menurun lagi menjadi 55,23 persen. Tetapi ternyata sejak tahun 1997 justru terjadi sebaliknya, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan menjadi semakin meningkat, hingga pada tahun 1999 mencapai sekitar 63,68 persen atau mirip dengan pola konsumsi pada dekade 80-an.

<https://jatim.bps.go.id>

1. Jumlah penduduk Jawa Timur tahun 1999 sekitar 34,899 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 1990-1999 sekitar 0,80 persen pertahun. Jumlah penduduk diperkirakan akan menjadi dua kali lipat pada tahun 2086, jika laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80 persen pertahun tetap berlangsung.
2. Angka TFR tahun 1999 sebesar 2,09 berarti sedikit lebih besar dibanding TFR pada tahun 1998 yang sebesar 2,03 tetapi masih lebih rendah apabila dibanding dengan TFR pada tahun 1997 yang sebesar 2,18. Menurunkan TFR apabila sudah mencapai sekitar angka 2 memang tidak mudah.
3. Kualitas sumber daya manusia di Propinsi Jawa Timur sudah semakin meningkat baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditandai dengan kenyataan semakin muda usia penduduk, Angka Melek Huruf (AMH) semakin mendekati angka 100 dan menunjukkan kecenderungan semakin rendahnya perbedaan antara AMH laki-laki dengan perempuan. Disamping itu juga ditandai dengan semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah dan mendidikan tertinggi yang ditamatkan terutama untuk jenjang SMTP atau lebih.
4. Derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat, yang ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan juga ditandai dengan semakin menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan semakin meningkatnya Umur Harapan Hidup (AHH).
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk usia 10 tahun keatas pada tahun 1999 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 1998 yaitu dari 60,19 menjadi 60,52. Tetapi hal ini tidak diiringi dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran/pencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 1999 sebesar 4,95 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen poin dibanding tahun 1998 yang sebesar 4,71 persen dari angkatan kerja.



6. Sekitar 6 diantara 10 rumahtangga di Jawa Timur sudah menempai rumah layak huni, yaitu rumah dengan luas lantai 50 meter persegi atau lebih, berinding tembok dan berlantai layak (semen, tegel, keramik atau marmer).
7. Sejak tahun 1997 proporsi pengeluaran penduduk untuk keperluan makanan semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 55,23 persen pada tahun 1996 meningkat menjadi 59,87 persen pada tahun 1997, meningkat lagi menjadi 61,21 persen pada tahun 1998 dan bahkan pada tahun 1999 menjadi 63,68 persen. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan sekitar bulan Januari 1999, kesejahteraan penduduk Jawa Timur dari sisi ekonomi tampaknya semakin menurun.

<https://jatim.bps.go.id>

<https://jatim.bps.go.id>

<https://jatim.bps.go.id>